

**PENGARUH COVID-19 TERHADAP HARGA BERAS, NILAI TUKAR PETANI DAN
KEMISKINAN DI WILAYAH PERDESAAN**

***THE EFFECT OF COVID-19 ON RICE PRICES, FARMER'S TERMS OF TRADE AND
POVERTY IN RURAL AREAS***

Ester Anida Gree Sitorus^{1*}

^{1*}Fungsional Statistisi Ahli Muda, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Penulis korespondensi: ester_ags@bps.go.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused restrictions on community activities and has potentially led to declining in economic activity due to rules for maintaining social distance, reducing mobilization, and avoiding crowds, popularly known as health protocol. This paper aims to study effect of Covid-19 on rice prices as well as farmer's terms of trade and rural poverty rates in West Java Province, Indonesia. The indications that occur will be discussed using a descriptive analysis method with data sources from monthly secondary data and semi-annual secondary data available from the Statistics of Indonesia (BPS). The effect of Covid-19 on rice prices as well as farmer's terms of trade and rural poverty rates will be analyzed descriptively by comparing the development of the three variables during before and after the covid-19 pandemic. The study resulted that the price of rice at the mill level during the COVID-19 pandemic was lower than before the pandemic. The combined Farmer's Terms of Trade (FTT) has also decreased during the covid period. However, specifically for food crops, FTT is maintained when compared to the period before the pandemic to a year after Covid entered Indonesia. The food crop FTT is maintained due to the price of grain relatively stable during the covid period. The study also found that the poverty rate is higher during the pandemic. It seems that this influence is in line with the economic growth rate which has decreased quite high during the covid period. With this study, it is recommended that the government has to maintain the stability of rice prices because it has a role in determining poverty.

Keywords: *food crops, rural area, poverty line*

ABSTRAK

Pandemic covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengindikasikan terjadinya penurunan kegiatan ekonomi karena adanya aturan harus menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari kerumunan, yang dikenal sebagai protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh covid-19 terhadap harga beras, nilai tukar petani dan angka kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pengaruh tersebut ditelaah secara deskriptif dengan membandingkan perkembangan variable-variabel tersebut antara periode sebelum dan sesudah pandemik covid-19. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa harga beras di tingkat penggilingan pada pandemik covid-19 lebih rendah dibandingkan pada waktu sebelum pandemic. Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan juga mengalami penurunan selama periode covid. Akan tetapi khusus NTP tanaman pangan tetap terjaga jika dibandingkan dari masa sebelum pandemik sampai dengan setahun setelah covid masuk ke Indonesia. Hal ini

disebabkan karena harga gabah relatif stabil selama periode covid. Namun demikian, angka kemiskinan lebih tinggi pada masa pandemik. Nampaknya pengaruh ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan cukup tinggi selama periode covid. Pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras karena memiliki andil dalam menentukan kemiskinan.

Kata kunci: tanaman pangan, wilayah perdesaan, garis kemiskinan

PENDAHULUAN

Harga gabah, harga beras di tingkat penggilingan dan Nilai Tukar Petani (NTP) telah dianggap sebagai indikator yang penting oleh pemerintah. Survei untuk melakukan pendataan dalam rangka mendapatkan ketiga angka tersebut telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin. Data yang diperoleh dipublikasikan secara rutin untuk umum dan diharapkan dapat dipergunakan dalam membantu pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan di sektor pertanian. Badan urusan logistik (Bulog) diberi tugas oleh pemerintah untuk mengamankan persediaan dan pendistribusian beras, dan mengamankan harga beras di Indonesia.

Pandemi covid-19 telah menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia (Kasna, 2021), dan hal ini telah terbukti dengan turunnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 (Yamali, R., Putri, R., 2020). BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% (BPS, Laporan Perekonomian Indonesia, 2020). Hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), bertambahnya angka pengangguran, dan selanjutnya meningkatkan angka kemiskinan (Hadiwardoyo, 2020). BPS melaksanakan survei sosial ekonomi nasional yang menghasilkan angka kemiskinan (Sahrizal, N., Taufiq, N., Masfufah, 2020).

Penghitungan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BPS didasarkan pada garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya, garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah nilai kebutuhan minimum selain makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (BPS, Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, 2020). Angka kemiskinan tersebut dibedakan atas dua kategori yaitu kemiskinan wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Menurut Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, rumah tangga tani yang berusaha dalam sektor pertanian di seluruh Indonesia berjumlah 27.682.117. Sementara itu rumah tangga tani di provinsi Jawa Barat berjumlah 3.250.825. Penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan sebagian besar berusaha di sektor pertanian (Rachmat, 2013). Petani tanaman pangan merupakan petani dengan subsektor terbesar di Indonesia karena sampai saat ini makanan pokok utama rakyat Indonesia adalah beras (Arifin, M., Saliem, H., 1992). NTP menjadi salah satu indikator penting yang saat ini sangat diperhatikan pemerintah dan menjadi salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan pembangunan sektor pertanian

suatu wilayah. Harga gabah menjadi faktor yang menentukan indeks harga yang diterima petani. Semakin tinggi harga gabah akan menyebabkan semakin tingginya NTP (Rachmat, 2013). Sehingga harga gabah dan NTP Tanaman Pangan mempunyai hubungan yang sangat erat (BPS, Diagram Timbang Nilai Tukar Petani, 2020). Harga gabah mempunyai hubungan yang erat dengan harga beras. Harga gabah dari produsen akan menentukan harga jual beras pada saat akan dibeli oleh konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh covid-19 terhadap harga beras, Nilai Tukar Petani dan kemiskinan di wilayah perdesaan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian tentang pengaruh harga beras, NTP dan kemiskinan di wilayah perdesaan selama pandemic covid-19 belum pernah diteliti sebelumnya. Lebih lanjut, penelitian serupa hingga saat ini juga belum pernah dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji agar dampak covid-19 terhadap kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan dapat dianalisis lebih dalam. Pandemi covid-19 menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia dan pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan agar ekonomi Indonesia tidak jatuh lebih dalam. Di samping itu arah pembangunan dan kebijakan yang diambil dapat diharapkan akan lebih tepat sasaran. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang cukup penting untuk mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat, karena luas lahan sawah Provinsi Jawa Barat menduduki posisi ke tiga se Indonesia (Prasetyo, 2020).

Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak di seluruh provinsi se Indonesia. Letak Jawa Barat bersebelahan dengan DKI Jakarta dan berfungsi sebagai provinsi penyangga kebutuhan pangan ibukota. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi di tahun 2020 lebih dalam dari pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 2,44 persen (Larasati, I., Prayogo, S., Intan, M., 2020). Tingginya jumlah penduduk yang terpapar covid-19 di wilayah ibukota dan Jawa Barat mengakibatkan munculnya aturan yang cukup ketat. Pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat turut mempengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah dalam mengawal harga beras yang berhubungan dengan NTP, dan mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data harga beras di penggilingan, data NTP, dan data kemiskinan yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Data runtun waktu (*time series*) harga beras di penggilingan dan NTP merupakan data runtun waktu bulanan dari mulai tahun 2018 sampai April 2021. Penelitian ini mencakup 18 kabupaten di Jawa Barat.

Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan dua rasio yaitu indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konseptual NTP merupakan alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan baik untuk konsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan dalam proses menghasilkan produk pertanian.

Ada sebelas variabel yang termasuk dalam kategori konsumsi rumah tangga yaitu : Makanan, Minuman Dan Tembakau, Pakaian Dan Alas Kaki, Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Lainnya, Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, Kesehatan, Transportasi, Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan, Rekreasi, Olahraga, Dan

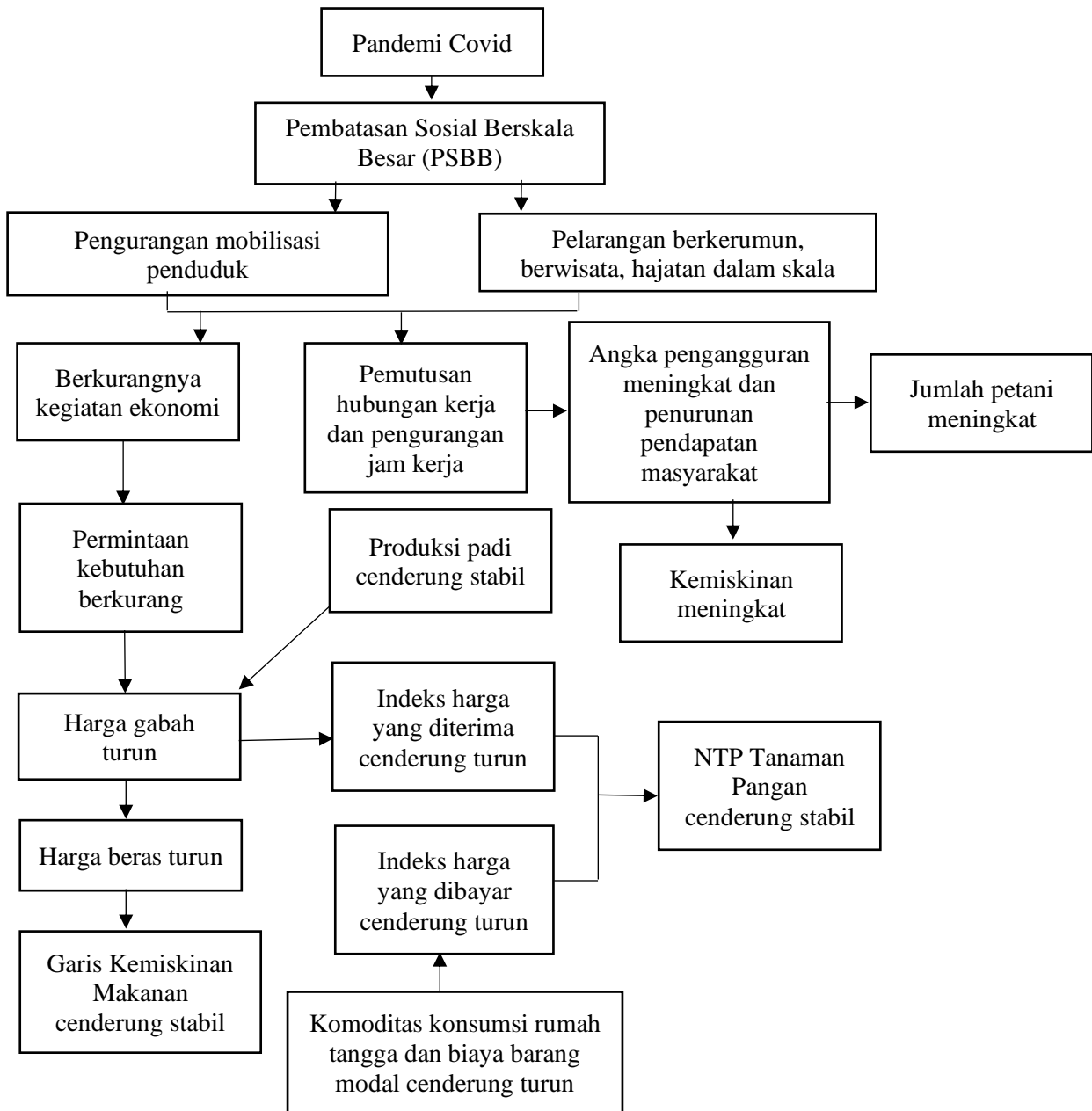
Budaya, Pendidikan, Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran, dan Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya. Biaya produksi dan penambahan barang modal terdiri dari enam variable yakni : Bibit, Pupuk dan Obat-obatan, Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain, Transportasi, Penambahan Barang Modal, dan Upah Buruh.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan metode tabulasi, dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis sehingga diperoleh gambaran tentang hubungan antar ketiga variable yakni harga beras di penggilingan, NTP, dan kemiskinan di wilayah perdesaan untuk periode waktu sebelum pandemic covid-19 dan selama 1 tahun pertama pandemik berlangsung di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

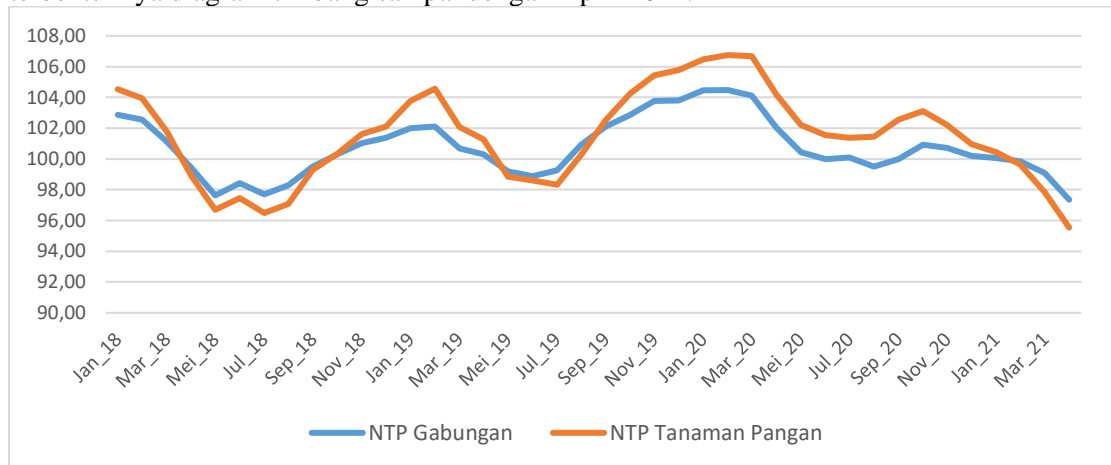
Secara umum, pandemic covid-19 telah menyebabkan kepanikan yang cukup besar di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi penularan virus covid-19, dan salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya kegiatan ekonomi dan membawa efek tambahan seperti berkurangnya permintaan akan bahan kebutuhan, pemutusan hubungan kerja/pengurangan jam kerja, dll. Sementara itu, pasokan bahan kebutuhan pangan tidak terganggu. Hal ini akan berhubungan dengan harga gabah dan harga beras di tingkat produsen dan secara langsung mempengaruhi NTP. Di sisi lain, angka kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan ekonomi dan penurunan pendapatan di masyarakat. Gambar 1 menggambarkan alur keterkaitan antara pandemic covid-19, harga beras, NTP, dan kemiskinan.



Gambar 1. Alur Keterkaitan Hubungan Pandemic Covid-19 dengan Harga Beras, NTP dan Kemiskinan

BPS Provinsi Jawa Barat menghasilkan NTP untuk 5 subsektor pertanian yang terdiri dari NTP Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Diagram timbang dibentuk berdasarkan survei penyempurnaan diagram timbang yang dilaksanakan secara rutin hampir setiap 5 tahun sekali. Diagram timbang yang terakhir dibentuk pada tahun 2018. Berdasarkan diagram timbang tahun 2018, bobot NTP tanaman pangan terhadap total nilai NTP gabungan sebesar 67,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman

pangan memiliki bobot tertinggi dibandingkan 4 subsektor lainnya. Lebih lanjut, bobot petani yang menghasilkan gabah terhadap NTP tanaman pangan sebesar 90,04 persen dan palawija sebesar 9,96 persen (BPS, Diagram Timbang Nilai Tukar Petani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas gabah masih menjadi komoditas utama untuk petani tanaman pangan. Gambar 2 menunjukkan pergerakan NTP gabungan dan NTP tanaman pangan dari mulai tahun 2018 terbentuknya diagram timbang sampai dengan April 2021.



Gambar 2. Perbandingan NTP Gabungan dan NTP Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-April 2021

Gambar 2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, titik terendah NTP terjadi di bulan Mei-Juli. Tetapi selama periode tahun 2020 NTP cenderung tidak mengalami kenaikan berarti dari bulan Mei sampai akhir tahun 2020, bahkan terus mengalami penurunan sampai April 2021. Panen raya Jawa Barat di tahun 2020 terjadi di bulan April-Mei seperti di tahun sebelumnya. Sementara itu, NTP tanaman pangan di tahun 2018 dan 2019 berada pada posisi lebih rendah dari NTP gabungan ketika musim panen raya yang biasanya terjadi di bulan April-Mei. Sedangkan NTP tanaman pangan tahun 2020 selalu lebih tinggi dibanding NTP Gabungan. Gambar 2 memperlihatkan bahwa daya tukar petani tanaman pangan lebih tinggi dibanding daya tukar petani pada umumnya.

Nilai tukar petani terbentuk dari rasio indeks yang diterima petani dibanding indeks yang dibayar oleh petani. Indeks yang dibayar oleh petani dipisahkan menjadi 2 yaitu indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Khusus petani tanaman pangan, harga gabah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi naik/turunnya indeks yang diterima petani. Untuk petani subsektor lainnya, harga beras merupakan faktor yang mempengaruhi indeks harga yang dibayar, karena beras merupakan komoditas yang mempunyai bobot cukup penting dalam konsumsi rumah tangga petani. Bobot beras sebagai komoditas dalam konsumsi rumah tangga untuk masing-masing subsektor berbeda.

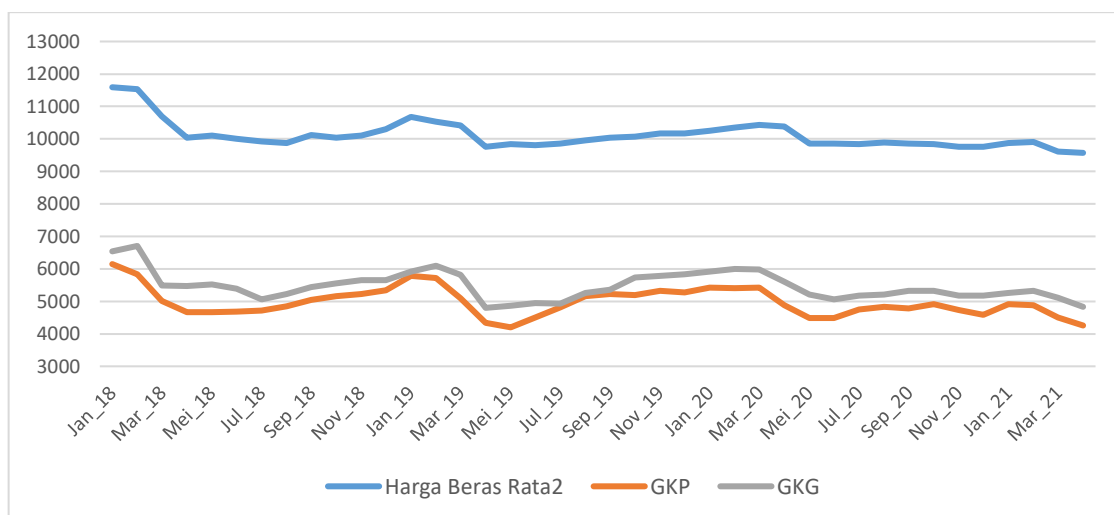
Dengan mengamati gambar 2, ada 2 kemungkinan yang terjadi pada masa pandemic covid. Pertama, laju pertumbuhan indeks yang diterima oleh petani subsektor tanaman pangan lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima oleh petani subsektor gabungan. Kedua, laju pertumbuhan indeks yang dibayar oleh petani subsektor tanaman pangan lebih rendah dibandingkan indeks yang dibayar oleh petani lainnya. Harga bibit, pupuk dan obat-obatan yang rendah sangat membantu mengurangi indeks yang harus dibayar petani. Upah buruh sulit untuk dikendalikan karena hampir selalu terjadi kenaikan upah minimum regional setiap tahun. Kenaikan upah minimum diatur berdasarkan aturan penambahan dari inflasi dan angka

pertumbuhan ekonomi. Khusus kondisi pandemic covid, upah minimum regional tidak mengalami kenaikan.

Tabel 1. NTP Tanaman Pangan dan NTP Gabungan 2018-2020 dan Perubahannya

Subsektor	Rata-rata NTP 2018	Rata-rata NTP 2019	Rata-rata NTP 2020	% Perubahan 2019-2018	% Perubahan 2020-2019
Tanaman Pangan	100,00	102,14	103,28	2,14	1,12
NTP Gabungan	100,00	101,33	101,41	1,33	0,08

Tabel 1 menggambarkan bahwa perubahan rata-rata NTP gabungan di tahun 2020 terhadap 2019 sangat kecil dibandingkan perubahan rata-rata NTP gabungan tahun 2019 terhadap 2018. Untuk rata-rata NTP tanaman pangan masih terjadi kenaikan yang cukup baik di tahun 2020 terhadap 2019, dan menunjukkan kenaikan NTP tanaman pangan lebih besar dibandingkan kenaikan NTP gabungan. Hasil ini menunjukkan walaupun dalam pandemic covid di tahun 2020, daya tukar petani tanaman pangan tetap mengalami kenaikan. Sementara kenaikan yang dialami oleh petani subsektor gabungan sangat kecil, yaitu sebesar 0,08 persen.



Gambar 3. Perkembangan Harga Rata-rata Beras, Harga GKP dan Harga GKG di 18 Kabupaten se Jawa Barat Tahun 2018-April 2021

Gambar 3 menunjukkan harga beras dari awal tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal lain yang dapat disimpulkan dari gambar 3 adalah ketika pandemic covid melanda Indonesia, harga beras di Jawa Barat terus berada pada posisi rendah dan tidak mengalami kenaikan sampai selama 1 tahun pandemic. Bahkan nilai tertinggi di tahun 2020 diraih pada bulan Maret 2020 ketika kasus covid pertama sekali ditemukan di Indonesia. Harga beras berhubungan dengan harga gabah, dan teori *supply-demand* sangat mempengaruhi harga gabah dan beras. Namun demikian faktor tengkulak atau pihak pembeli juga dapat menentukan harga di lapangan (Hidayat, 2020). Gambar 3 memperlihatkan fenomena yang hampir sama bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) mengalami penurunan pada saat panen raya dan harga bertahan dalam posisi rendah selama pandemic. Curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun 2021 menurunkan kualitas gabah dan akan

menurunkan harga. Bahkan beberapa wilayah kabupaten di Jawa Barat mengalami banjir. Untuk menghasilkan gabah yang layak untuk digiling akan memerlukan proses tambahan berupa proses pemanasan/pengeringan (Setiawati, 2020).

Selanjutnya, pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemik nampaknya tidak berdampak pada rantai pasok pendistribusian beras. Masyarakat dapat memperoleh beras di pasar tradisional maupun pasar swalayan dengan harga normal. Dengan demikian harga beras tidak terganggu oleh masalah transportasi atau PSBB.

Tabel 2. Persentase Perubahan Harga GKP, Harga GKG dan Harga Beras April 2020-2021

	% Perubahan (YoY)		
	Harga GKP	Harga GKG	Harga Beras
April 2020	9,29	11,97	6,50
Mei 2020	3,00	0,58	0,13
Juni 2020	-1,41	-3,63	0,60
Juli 2020	2,96	-1,82	-0,01
Agustus 2020	1,67	-1,92	0,36
September 2020	-2,52	-1,31	-1,76
Oktober 2020	-1,91	-3,47	-2,24
November 2020	-7,18	-7,90	-3,97
Desember 2020	-11,97	-10,40	-4,02
Januari 2021	-6,97	-9,42	-3,76
Februari 2021	-5,78	-8,62	-1,97
Maret 2021	-8,64	-11,45	-7,82
April 2021	-7,53	-14,93	-7,88

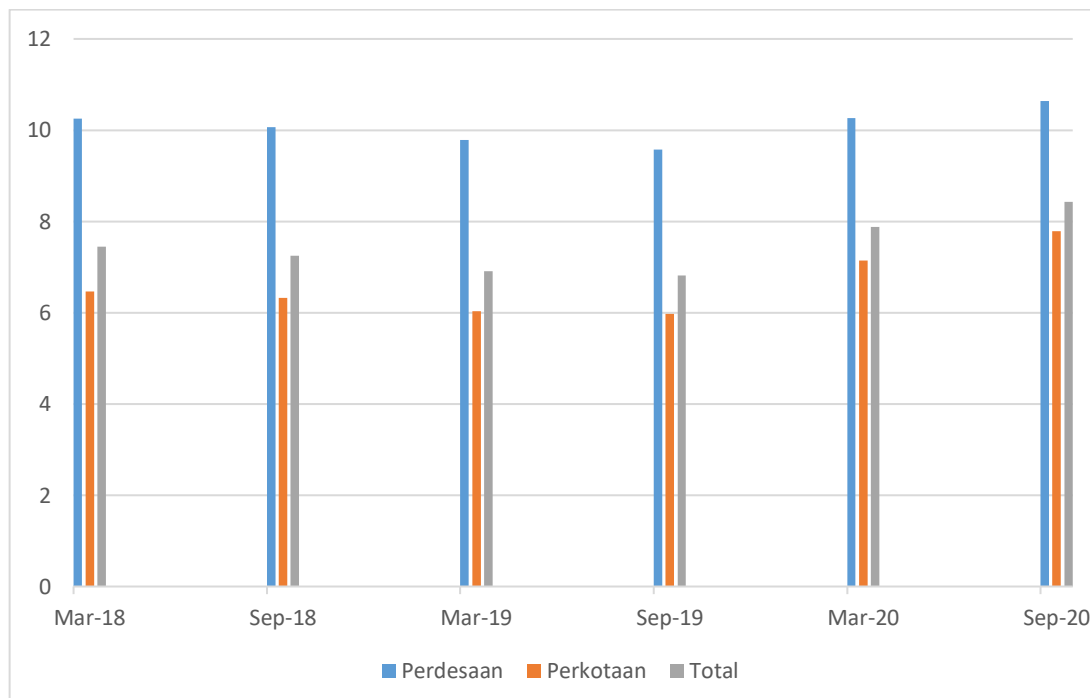
Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa perubahan harga gabah dan harga beras tidak selalu berkorelasi. Apabila dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya, penurunan harga gabah relatif lebih tajam dibandingkan harga beras selama pandemic covid-19.

BPS menghitung hasil produksi padi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan hasil kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penghitungan teknologi citra satelit menghasilkan data produksi padi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat sekitar 9,017 juta ton GKG. Di tahun 2019 Provinsi Jawa Barat menghasilkan sekitar 9,085 juta ton. Produksi padi di tahun 2019 lebih besar dari tahun 2020 sebesar 68,18 ribu ton. Penurunan harga beras diakibatkan oleh banyaknya pasokan dan berkurangnya permintaan. Di tahun 2020 terjadi pembatasan kegiatan yang mengakibatkan pengurangan aktivitas masyarakat. Pembatasan kegiatan seperti mobilisasi masyarakat, kegiatan berkumpul, kegiatan berwisata, pengadaan hajatan dll, menyebabkan berkurangnya permintaan akan bahan-bahan makanan. Hal ini menyebabkan melimpahnya pasokan beras dan menyebabkan turunnya harga.

Akan tetapi penurunan harga beras tidak menyebabkan penurunan NTP, karena NTP pada bulan September dan Oktober 2020 mengalami kenaikan, sementara harga beras pada bulan-bulan tersebut berada di posisi yang sama. Faktor lain yang dapat meningkatkan NTP adalah terjadinya penurunan indeks harga yang harus dibayar petani. Penurunan indeks harga yang dibayar dapat terjadi akibat penurunan indeks untuk konsumsi rumah tangga atau indeks yang dikeluarkan untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Penurunan harga komoditas lainnya yang dibutuhkan petani akan mendongkrak NTP. Inflasi/deflasi di tingkat perdesaan sangat mempengaruhi NTP. Kelancaran penyediaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan produksi akan mempengaruhi harga komoditas-komoditas tersebut.

Survei Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat menggambarkan bahwa sampai tahun 2021, ada tiga subsektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di provinsi Jawa Barat yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian. Ketiga sektor tersebut menduduki posisi tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 (BPS, Keadaan Angkatan Kerja BPS Provinsi Jawa Barat, 2020). Pada tahun 2018-2019, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah 13-an persen. Angka persentase tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2020 menjadi 16 persen. Bahkan data di bulan Februari 2021 menunjukkan terjadi peningkatan persentase menjadi 17%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pandemic covid menimpa Indonesia, semakin banyak penduduk yang berusaha di sektor pertanian. Terjadi penambahan petani dari Februari 2020 ke Februari 2021 sebanyak 0,28 juta orang.

BPS mencatat angka pengangguran di wilayah Jawa Barat selama pandemic covid mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran di bulan Februari 2020 berjumlah 1,89 juta orang. Angka ini naik menjadi 2,53 juta orang di bulan Agustus 2020, dan turun menjadi 2,19 orang di bulan Februari 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat juga mengalami fluktuasi. TPAK bulan Agustus 2020 lebih kecil dibandingkan TPAK bulan Februari 2020. Angka TPAK yang kecil mengindikasikan terjadinya penurunan pendapatan yang disebabkan bertambahnya pengangguran. Kondisi masyarakat pada bulan Agustus belum menentu dan masih berada pada ketidak pastian akan kapan berakhirnya pandemic. Pemerintah Indonesia dan dunia masih berusaha menemukan jalan keluar dari pandemic. TPAK pada bulan Februari 2021 mengalami kenaikan walau belum mampu menyamai kondisi bulan Februari 2020 yaitu sebelum pandemic. Proses vaksinasi yang dimulai pada awal tahun 2021 diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktifitas seperti sebelumnya.



Gambar 4. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan, Wilayah Perkotaan dan Wilayah Gabungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Gambar 4 memperlihatkan bahwa persentase angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan di bulan September 2020 dibandingkan Maret 2020 pada awal terjadinya pandemic. Hal ini sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020. Persentase angka kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan lebih tinggi dari wilayah perkotaan di Jawa Barat. Namun bila dibandingkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada perdesaan. Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten 9 kota, 627 kecamatan yang terdiri dari 5957 desa dan kelurahan (BPS, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2021).

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran komoditi makanan dan non makanan. Ada 52 jenis komoditi makanan yang memiliki kontribusi untuk garis kemiskinan makanan meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lain-lain. Peran pengeluaran komoditi makanan pada masyarakat tingkat ekonomi rendah terhadap garis kemiskinan lebih dominan dibandingkan pengeluaran komoditi non makanan. Menurut data Susenas bulan September 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan untuk masyarakat di perdesaan, sebesar 75,99 persen. Lebih lanjut beras merupakan komoditas yang memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar 21,66% (BPS, Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, 2020).

Hal ini semakin menunjukkan bahwa beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi masyarakat perdesaan. Harga beras murah dan terjangkau akan memberikan dampak yang positif terhadap penduduk miskin, karena kemampuan atau daya beli penduduk di wilayah perdesaan menjadi cukup tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, utamanya beras. Harga beras murah masih tetap dapat menguntungkan petani apabila harga komoditas untuk menghasilkan produksi pertaniannya juga dapat dipertahankan rendah, misalnya harga pupuk, harga bibit, biaya transportasi dll. Dengan demikian petani masih dapat menikmati margin yang cukup besar.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat (Juta)

	Mar-18	Sep-18	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20
Perdesaan	1,288	1,203	1,130	1,110	1,194	1,183
Perkotaan	2,328	2,336	2,269	2,266	2,726	3,005
Total	3,616	3,539	3,399	3,376	3,920	4,188

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan relatif lebih kecil dibanding jumlah penduduk miskin di perkotaan. Seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat, berkurangnya kegiatan ekonomi sangat dirasakan di wilayah perkotaan yang banyak berusaha sebagai pekerja di sektor industry dan jasa. Penduduk di wilayah perdesaan masih bisa berusaha di sektor pertanian yang relatif membutuhkan banyak tenaga kerja

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata harga beras selama pandemi cenderung lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Hal ini disebabkan penurunan permintaan dan pada saat yang sama kinerja produksi relatif terjaga. (terkonfirmasi oleh harga gabah yang relatif rendah karena produksi padi yang cukup baik/tidak terganggu).

Rata-rata harga gabah selama pandemi cenderung lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi. Ini disebabkan kinerja produksi yang tetap terjaga selama pandemi. Pandemi nampaknya tidak berdampak pada aktivitas budidaya tanaman padi.

Rata-rata NTP selama pandemi tidak jauh berbeda dibanding periode sebelum pandemi bahkan cenderung meningkat. Nilai tukar petani relatif terjaga selama pandemi. Penurunan harga gabah selama pandemi nampaknya tidak berdampak pada penurunan nilai tukar petani tanaman pangan. Harga biaya produksi dan barang-barang konsumsi baik inflasi/deflasi pedesaan relatif terjaga selama pandemi.

Kemiskinan pedesaan meningkat selama periode pandemi meski pada saat yang sama harga beras sebagai kontributor utama garis kemiskinan, mengalami penurunan. Naiknya kemiskinan selama pandemi nampaknya disebabkan oleh penurunan pendapatan/pengeluaran (rumah tangga non-pertanian).

Saran

Pemerintah harus berupaya terus menerus menjaga komoditas yang mempengaruhi indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan bahan modal untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani. Harga beras rendah harus tetap dipantau dengan mengupayakan distribusi beras yang tidak terlalu panjang dan pasokan yang cukup, karena akan membantu menurunkan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Saliem, H. (1992). Pola Konsumsi Pangan Pokok di Beberapa Propinsi di Indonesia. *Forum Peneliti Agro Ekonomi*, 86-95.
- BPS. (2020). *Diagram Timbang Nilai Tukar Petani*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Keadaan Angkatan Kerja BPS Provinsi Jawa Barat*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship*, 83-92.
- Hidayat, Y. (2020). Analisis Implementasi Manajemen Rantai Pasok Beras di Perum Bulog Gudang Singakerta Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 763-773.
- Kasna, I. (2021). Dampak Pengangguran Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawarti*, 58.
- Larasati, I., Prayogo, S., Intan, M. (2020). *Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Prasetyo, O. K. (2020). *Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia*. BPS.
- Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Peneliti Agro Ekonomi*, 111-122.
- Sahrizal, N., Taufiq, N., Masfufah. (2020). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Setiawati, D. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Gabah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 783-793.
- Yamali, R., Putri, R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 384-388.